

KORUPSI MEMBUKA PANDORA BOX PERILAKU KORUP DARI DIMENSI ETIKA, BUDAYA DAN KEPERILAKUAN



Judul : Korupsi: Membuka Pandora Box Perilaku Korup dari Dimensi Etika, Budaya dan Keperilakuan
Penulis : Ardeno Kurniawan
Penerbit : Penerbit ANDI
Tahun terbit : 2018
Jumlah halaman : 204
ISBN : 978-979-29-6583-4

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 menyebutkan bahwa indeks perilaku anti korupsi meningkat pada 2019. Data tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat makin tidak permisif terhadap korupsi. Meski demikian, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 menunjukkan jumlah penuntutan kasus korupsi kian meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah kontrol sosial yang menguat, mengapa kasus korupsi justru masih saja terjadi dan kian meningkat? Buku ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut bagi khususnya pembuat kebijakan dan pengamat perilaku organisasi.

Buku yang ditulis oleh seorang auditor Aparatur Sipil Negara (ASN) ini membagi pembahasannya menjadi enam bab. Pada bab pertama, penulis menyajikan dasar filosofis perilaku korupsi. Bagian ini menekankan bahwa motivasi perilaku koruptor tidak hanya motivasi ekonomi semata, lebih dari itu, korupsi dipengaruhi oleh beberapa dimensi antara lain perilaku, etika, sosial dan budaya. Sebelum melangkah lebih jauh, penulis memberikan pemahaman dasar bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan kepentingan diri pelaku atau kelompoknya dan merugikan negara.

Penulis menekankan tindakan korupsi merupakan tindakan kriminal yang serius sebab dari tinjauan sejarah, korupsi dan ketidakmampuan manusia dalam mengontrol nafsunya telah menghancurkan beberapa peradaban seperti Islam dan Romawi. Lebih lanjut, penulis mendeskripsikan beberapa teori tentang perilaku korupsi dan intervensi pencegahannya. Beberapa yang diungkapkan dalam penjelasan penulis antara lain teori pilihan rasional, *bad apple theories*, teori budaya organisasi dan tekanan masyarakat yang permisif pada korupsi. Teori pilihan rasional meyakini bahwa korupsi disebabkan karena pelakunya merasa kerugian dari tindakan korupsi lebih kecil dari manfaatnya. Sehingga, intervensi pencegahannya adalah memperkuat pengawasan dan memperberat sanksi hukuman. *Bad apple theories* meyakini bahwa pelaku korupsi memang sudah memiliki karakter yang buruk, maka itu intervensinya adalah dengan melaksanakan seleksi pegawai secara lebih ketat. Teori budaya organisasi menjelaskan bahwa perilaku korupsi

dilatarbelakangi oleh loyalitas pada organisasi dan dipengaruhi oleh kepemimpinan yang koruptif.

Pada bagian dua, penulis mengelaborasi korupsi dalam konteks Indonesia. Menurut penulis, korupsi di Indonesia secara dominan didorong oleh motivasi budaya yakni dengan adanya nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan rasa sungkan. Nilai-nilai tersebut sering dibelokkan oleh para koruptor, diperparah dengan masyarakat yang permisif dengan pemberian yang mengandung harapan timbal balik untuk kepentingan pemberi. Pada sub bagian yang lain penulis menjabarkan stereotip yang melatarbelakangi tindakan korupsi di Indonesia antara lain perilaku yang mengabaikan kualitas, mencari kemudahan, tidak percaya diri, feodalisme, komunal dan rasa sungkan terhadap kelompok. Sayangnya, penjelasan tersebut tidak disertai studi dan data yang menjelaskan korelasi dan eksistensi perilaku tersebut terhadap korupsi di Indonesia. Menurut penulis, stereotip tersebut secara historis, tertanam dari masa kolonial dan orde baru dengan tipe birokrasi yang patrimonial atau batasan hubungan ekonomi, privat, dan politik yang tidak terbatas antara atasan dan bawahan. Sehingga, intervensi yang perlu dilakukan untuk menghentikannya adalah proses sosial. Lebih lanjut, penulis menjelaskan korupsi dari kacamata antropologis dan sosiologis yang tak banyak berbeda dari penjelasan pada bab pertama. Dari sudut pandang sosiologis, korupsi dapat terjadi pada mekanisme diskresi yakni inovasi-inovasi yang terbuka dilakukan pembuat kebijakan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Aparat hukum hendaknya teliti dalam menindak kasus korupsi dalam diskresi, harus dilihat apakah diskresi tersebut merugikan kepentingan masyarakat atau tidak.

Masih pada bab yang sama, pembahasan penulis melompat pada gratifikasi yakni pemberian dari seseorang untuk pejabat baik publik atau swasta dengan tujuan penyalahgunaan wewenang dan melancarkan kepentingan pemberi. Dampak dari gratifikasi yakni berkurangnya objektivitas penyelenggara negara. Pada puncak bab dua, penulis menjabarkan mekanisme terjadinya korupsi dalam organisasi. Pertama-tama korupsi terjadi dalam proses institusionalisasi yang merupakan pembiasaan-pembiasaan perilaku korupsi sehingga diterima, dan menjadi sebuah rasionalisasi. Sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah.

Pada bab tiga, penulis membahas korupsi dari beberapa mazhab yang menjelaskan perilaku menyimpang. Definisi perilaku menyimpang dalam buku ini yakni tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan etika universal. Beberapa mazhab yang dibahas penulis dalam bab ini antara lain mazhab rasional, mazhab positivism, mazhab Perancis, viktimologi dan perilaku biologis dan psikologis. Mazhab rasional, seperti yang sudah dijelaskan pada bab pertama, meyakini korupsi terjadi karena pertimbangan manfaat dan kerugian. Sedangkan mazhab positivism meyakini korupsi terjadi karena kecenderungan karakter pelakunya dari lahir. Mazhab yang dipopulerkan oleh Lambroso ini kemudian banyak dikritik. Mazhab Perancis menjelaskan perilaku korupsi secara lebih realistis yakni dipengaruhi lingkungannya yakni salah satunya tuntutan yang dikonstruksi masyarakat. Sudut pandang lain yang menarik dibahas penulis untuk menjelaskan korupsi adalah sudut pandang viktimologi yang membahas perilaku korupsi yang dipacu oleh korban yakni sistem pengawasan yang lemah dan peraturan yang berbelit-belit. Terakhir pada bab ini penulis mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan kerah putih. Sebab, dilakukan oleh orang berkompetensi, tersembunyi dan kompleks dan

non-violent terorganisasi dan terencana dengan memanfaatkan pekerjaan dan jabatan yang dimiliki.

Pada bagian empat, penulis membahas lebih mendalam dari teori-teori psikologi sosial yakni psikoanalisis, *anomie*, *bounded rationality*, netralisasi, dan lagi-lagi pilihan rasional. Dari pembahasan psikoanalisis, korupsi merupakan hasil pertarungan antara *id* (dorongan agresi), *ego* (dorongan mencapai keinginan dengan cara yang reliastis dan diterima), dan *super-ego* (rasa bersalah) yang dimenangkan oleh *id*. Sedangkan teori *anomie* yang dipopulerkan oleh Durkheim menjelaskan bahwa order dan norma dalam masyarakat tak dapat mencegah lagi perilaku menyimpang sebab lingkungan heterogen yang gagal dalam proses akulturasi, sehingga banyak anggota masyarakat yang merasa nilainya tidak dihargai. *Bounded rationality theory* meyakini korupsi terjadi karena kurangnya informasi pelaku tentang pengawasan dan sifat tempramen seseorang sehingga ia mudah mengambil keputusan. Terakhir, teori netralisasi menjelaskan mekanisme netralisasi atas perasaan bersalah dari pelaku korupsi yakni dengan memberikan alasan bahwa mereka tidak bermaksud melakukannya, tidak menyakiti siapapun, setiap orang melakukannya dan menyalahkan budaya organisasi.

Pada bab lima penulis menjelaskan proses normalisasi korupsi yakni mekanisme yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya yakni institusionalisasi, rasionalisasi dan sosialisasi. Mekanisme-mekanisme tersebut diwarnai dengan tiga pembiasaan yakni perubahan yang mengarah pada perilaku koruptif secara perlahan (*compulsion*), loyalitas terhadap perilaku tersebut (*compliance*), dan penyebaran kebiasaan korupsi dari individu ke individu dalam organisasi (*contagion*) dan terakhir yakni korosi yakni struktur yang mendorong perilaku korup.

Pada pungkas buku ini, penulis menjelaskan dimensi etika dan aturan kebijakan public tentang korupsi dan mendeskripsikan jenis aturan dan contoh kasus pelaporan korupsi oleh seorang *whistleblower*. Buku ini secara keseluruhan cukup komprehensif dan baik bagi pemula yang ingin mencari pengetahuan tentang korupsi sebab teori-teori yang disajikan dari berbagai sudut. Meski demikian, penyajiannya kurang sistematis dan kurang berhubungan antar bab dan sub babnya. Sehingga, relevansi penjelasan pada bab atau sub bab sebelumnya kurang terasa pada bab berikutnya. Pada beberapa bab, penjelasan teori tentang korupsi masih diulang-ulang seperti penjelasan tentang tindakan rasional dan mekanisme korupsi yang diulang dalam beberapa bab. Selain itu, tidak seperti buku-buku perilaku organisasi dan perilaku manusia yang saat ini sedang populer, buku ini disusun tanpa data, eksperimen atau studi kasus yang dilakukan penulis sendiri untuk mengonfirmasi teori korupsi dan intervensinya. Sehingga, tidak ada hal baru dan solusi praktis terhadap korupsi yang kian meningkat yang bisa didapatkan dari buku ini. Namun, buku ini bagus untuk menambah pengetahuan bagi praktisi pemula (Pratiwi).

Penulis resensi : Pratiwi, S.Sos., MA. (Peneliti Pertama di Puslatbang PKASN LAN)

**LEMBAR ABSTRAKSI (CURRENT CONTENT)
TAHUN 2019**

1. **Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan dalam rangka Pencapaian Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen);** Oleh Hadi Arnowo; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.

The target for Complete Systematic Land Registration (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL) in Kebumen Regency in 2017 as many as 50,000 fields and in 2018 as many as 68,750 fields have been achieved entirely (100%). The success is inseparable from leader and employees role in Kebumen Regency Land Office, specifically employee motivation. Determining factors of employee motivation include the leadership style and organizational culture. This study aims to determine the effect of leadership style and organizational culture on employee's work motivation associated with achieving PTSL target. Quantitative approach with explanation technique is used in the study. Data are collected by questionnaire, and then analyzed using correlation test and regression technique. The result of the correlation test on the questionnaire data indicate that there is a strong and significant influence of leadership style factors and organizational culture on employee motivation. The appropriate leadership style for the Land Office is an effective leadership style that can create employees solidarity to achieve PTSL target. Whilst organizational culture that is appropriate for the Land Office is dynamic organizational culture that can implement conflict management, openness, creativity, and appreciation toward well performed employees. The influence of leadership style and organizational culture simultaneously increase employees work motivation to achieve work target.

Keywords: leadership style, organizational culture, work motivations

2. **Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 1970)** Oleh Masrully; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.

The high frequency of occupational accident in government-based projects between 2017-2018 and backing up with Social Security Administrative Body (BPJS) for Employment accident data has shown that occupational safety and health (OSH) is a crucial issues in Indonesia. These accidents were happening even though there is a specific law namely Law No. 1 Year of 1970 about Occupational Safety. This study aims to evaluate the performance of OSH policy implementation in Indonesia. Qualitative decriptive approach was used in this study. Data collected through secondary data from Ministry of Employment, Ministry of Health and Social Security Administrative Body for Employment. This study concluded that OSH policy has not implemented completely. It is caused by weak regulation, lack of supervision, low level of compliance, and misconception about OSH. The study suggested several points for government i.e: 1) to revise the OSH law by accomodating current condition, 2) to increase the number of labor inspectors, and 3) to improve public conception, especially toward OSH target groups.

Keywords: Occupational Safety and Health (OSH), Public Policy Implementation

3. **Case Studies of Public Sector Innovation in Increasing Local Tax Compliance** Oleh Pratiwi; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.

Inovasi sektor publik (ISP) merupakan faktor pendorong yang krusial dalam pembangunan ekonomi. Pajak merupakan salah satu pendukung pembangunan sebagaimana 70% pengeluaran negara dibiayai dari pajak. Meski demikian, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih kurang

dari 13% dan termasuk yang terendah diantara negara-negara di Asia Tenggara. Kajian ini mendeskripsikan dua studi kasus pada konteks pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran warga untuk membayar pajak. Kajian ini berfokus pada proses inovasi, alur pengetahuan, kondisi pendukung dan tantangan dalam implementasi inovasi. Dengan menggunakan metode studi kasus, kajian ini merekomendasikan bahwa penghargaan terhadap inovator, pelatihan pegawai, kerjasama multi-stakeholder, dan pendekatan *bottom-up* telah menstimulasi kesadaran berinovasi dalam organisasi pemerintah.

Kata Kunci: Inovasi sektor publik, penerimaan pajak, organisasi pemerintah daerah.

4. **Analisis Perencanaan E-learning Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Bandung;** Oleh Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.

This study aims to analyze the extent of e-learning planning at the Graduate School of Public Administration of The National Institute of Public Administration (STIA LAN), Bandung. This study used descriptive qualitative approach, with observation, interview, and documentation as its data collection techniques. The analysis results showed four main findings. First, e-learning planning was based on the prevailing laws and regulations. Moreover, the Human Resources aspect was very good since it consisted of competent staffs. Furthermore, from the perspective of teaching material, e-learning planning has already had systematic and planned efforts. Finally, e-learning planning had good infrastructure. As recommendation, e-learning application and a filming studio will enhance the effectiveness of the e-learning implementation in STIA LAN Bandung.

Keywords: planning analysis, e-learning, electronic learning

5. **Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) pada Kementerian Keuangan** Oleh Hasan Ashari dan Rachman Sukri; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.

The SIMPeL application is developed by LPSE of Ministry of Finance to facilitate the direct procurement process. Based on KMK No. 275/KMK.01/2015, in 2016 all offices of the Ministry of Finance should use the SIMPeL application. In 2017, the offices that uses the SIMPeL application are 360 of 1109 offices. Therefore, it is necessary to study the reason behind the unwillingness to use SIMPeL application. This study aims to determine the factors that influence the acceptance of the use of SIMPeL applications using Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). This research is an explanatory study. The research model was tested using the 160 respondents of the online survey. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this study are as follow. Both, Performance Expectancy and Effort Expectancy, affect Behavioral Intention. Furthermore, the Behavioral Intention and Facilitating Conditions, together, directly affect the behavior of using the SIMPeL. In contrast, Social Influence does not affect the Behavioral Intention and the use of the SIMPeL. Besides that Facilitating Conditions has medium effect while the other three factors have small effect.

Keywords: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Direct Procurement, SIMPeL, Partial Least Square (PLS)

6. **Evaluasi Praktik Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Indonesia** Oleh Asih Setiawati; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.

Government research and development institutions in Indonesia are faced with conditions of low R & D output, however only a few could fulfill the society's needs. The purpose of the

research is to describe the practice of competency development for Researcher and Engineering HR professional that has been applied in government research and development institutions, and in addition, to create alternative HR development strategy in producing quality human resources that need to be carried out by government research and development institutions. The study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and focus group discussions supported by the study of internal documents of the institution. The research findings show that R & D institutions have a good awareness of the concept of HR development by giving researchers the opportunity to learn. However, from the results of the research, it was proven that R & D institutions were not on the right track in developing HR. This research then formulates a framework that can be used to develop research and engineering HR in government R & D institutions. Furthermore, this study recommends several things such as: (1) formation of a change team, (2) the creation of an integrated HR development framework, and (3) preparation of HR development needs analysis for each individual researcher and engineer HR.

Keywords: Training and Development, Career Development, Organizational Development, Government Research and Development Institutions.

7. **Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang;** Oleh Ahmad Sururi; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.

The rapid development of the informal sector of street vendors in urban areas requires comprehensive handling and synergetic policies from policy stakeholders. Unmanaged street vendors might create problems such as the use expanded use of public facilities and public spaces that lead to congestion. Those problems reduce the aesthetic aspect of the city. Another problem in Serang City is an average street vendor does not have a Business Registration Letter (SDU) or illegal. Therefore, the situation triggers the establishment street vendor arrangement and empowerment policy. The purpose of this study is to analyze the performance of street vendor arrangement and empowerment policy in the Serang Royal Market Area and this study also formulates an innovation strategy for structuring and empowering street vendors in the Serang Royal Market Area. By employing a descriptive qualitative approach, the informants of this study are ten people, namely street vendors, managers of the Association of Street Vendors in the Serang Royal Market Area, and apparatus of the Serang City Cooperative Trade and Industry Office and Serang City Civil Service Police Unit. The data in this study uses primary data and secondary data. By considering several indicators, such as coverage, accessibility, and the suitability of the program with the empowerment and arrangement of street vendors policy, this study concludes the policy implementation of street vendor empowerment and arrangement is quite good. However, other indicators, such as the bias indicators, frequency indicators, service delivery, and access indicators, have not carried out intensively and sustainably. Finally, this study recommends the empowerment and arrangement policy of street vendors in the Serang Royal Market Area can be done further through the modification of five fundamental principles of policy innovation. The principles, namely 1) Kinds of Support; 2) Management of Innovation; 3) Type of Relationship and 4) Kind of Value Creation and 5) Output and outcome innovation.

Keywords: Implementation Performance, Policy Innovation, Street Vendors, Royal Market.

8. **Implementasi Manajemen Pengetahuan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Garut;** Oleh Tjutju Yuniarsih dan Hendarsita Amartiwi; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.

This study investigates the factors affecting knowledge management, consisting of acquisition of knowledge, storage of knowledge, distribution of knowledge and use of knowledge, at Private

Higher Education Institutions in Garut Regency. The purpose of this study is to analyze the factors shaping the knowledge management. By using a survey method with a quantitative approach, the unit of analysis of this study are 229 lecturers at 14 Private Universities in Garut Regency. The data is collected through questionnaires distributed directly to lecturers. By employing descriptive statistical analysis and Confirmatory Factor Analysis (CFA), the data is processed. The findings show that the use of knowledge and the storage of knowledge are the most powerful factors in knowledge management, followed by the acquisition of knowledge, and distribution of knowledge.

Keywords: knowledge management, acquisition of knowledge, storage of knowledge, distribution of knowledge, use of knowledge.

9. Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal : Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat; Oleh Endah Mustika Ramdani; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.

Innovation in public services is in demand, both for central and local governments to improve services to the citizens. There is a risk of rejection in public service innovations at the local level from people who are not ready to change. This study aims to examine a case study of local government innovation in the health sector named Cimalaka Sehat e-health innovation. This study employs a case study qualitative method at the Cimalaka Sehat e-health innovation as a pioneer of e-health innovations in the Sumedang Regency. This study collects data through observations, in-depth interviews, and documentations. The interviewees are chosen purposively. The results show that e-health innovation can be categorized as incremental level innovation because the case carries a new perspective of public services. This innovation provides more convenient procedures through online registration and other services to support the improvement of the quality of services to the citizens. The implementation of e-health has been carried out in accordance with the objectives set. However, some problems are still found in order to meet the objectives. The problems are such as no comprehensive understanding about the benefit of innovation, and low commitment and consistency from supporting division to implement the innovation because some of the support units are in still the comfort zones. They are reluctant to use such innovation platform by still providing other alternative services related to e-health services (such as via WhatsApp), and it reduces the usefulness of the innovation platform. As a result, people are reluctant to change to existing services.

Keywords: Innovation, Local Government Innovation, Public Service

10. Model Implementasi Inovasi di Sektor Publik Studi pada Inovasi E-Office Satu Pintu di Puslatbang PKASN LAN; Oleh Hari Nugraha; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.

Innovation is necessary for organizations to improve service and performance. Puslatbang PKASN LAN develops the innovation called one-stop e-office. One-stop e-office consists of some functions such as a website integration program; the official correspondence electronic system; the staffing information system; and the inventory information system. One-stop e-office aims to simplify the office administration to support the implementation of the organization tasks. The programs have developed and maintained to ensure innovation sustainability. One-stop e-office innovation aims to facilitate the implementation of office administration to support the implementation of the tasks and functions of the organization. Therefore, this study aims to explain the implementation process of innovation. This study describes the implementation model of one-stop e-office innovation in Puslatbang PKASN LAN. This research employs qualitative approach and descriptive method. This study collects data through literature study, in-depth interviews, and observation. The data is analyzed using descriptive qualitative technique. The study shows that the innovation is implemented through three stages, namely the generation, acceptance and implementation of ideas. The factors that

drive the innovation implementation are the support from the stakeholders; the availability of competent personnels; the innovation competition climate in LAN; and the technological availability. However, there are factors that inhibit the innovation such as the different interest between organization units; and limited resources for the innovation implementation.

Keywords: E-office, Innovation, Implementation.

11. **Perencanaan Strategis Kawasan Berbasis Tata Kelola Lingkungan Terdesentralisasi yang Baik pada Kawasan Situ Gede Kota Tasikmalaya;** Oleh Tomi Setiawan, Endang Suhendar, Hilman A. Muhyi, dan Dayat Hidayat; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.

This paper aims to explain the lake strategic planning of Situ Gede in Tasikmalaya municipality based on good decentralized environmental governance. This study uses qualitative approach through non-participatory observations, interviews, a literature study and documentation. The data are analyzed through a three-stage model of data analysis namely data reduction, data display, and conclusions and verification. The result indicates that the Situ Gede area strategic planning which supports good decentralized environmental governance is conducted using participatory mechanism. Participatory mechanism in planning means the community is included in each stage of planning, so they have a sense of ownership and a sense of responsibility to support the sustainability of the program's implementation. Each stage of planning and implementation must involve the whole community so that the community can learn and get the benefits of each stage directly. Each stage also must be done collaboratively with the involvement of all relevant stakeholders to avoid conflicts of interest between sectors.

Keywords: good decentralized environmental governance, strategic planning

12. **Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance;** Oleh Neri Fajarwati; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.

The existence of village governments lately has not been able to function properly. The capacity of the village apparatus is still inadequate and the skills are still very limited. The lack of education and training to improve the competency of village officials is the root of the problem. This study uses descriptive qualitative approach. The purpose of this study is to investigate the influencing points, efforts and constraints of developing the capacity of the current village apparatus. The limited resource such as budget is an obstacle in improving the quality of village officials. The lack of a budget has had an effect on programs and activities in the context of developing the capacity of village apparatus that cannot be implemented. The steps that can be used in capacity development for village officials are capacity building through training for ordered village administration, manuscripts and management of official letters, village government accountability reports, compilation of village expenditure budget, village fund allocation management and village wealth management and management of village owned enterprises. To implement the steps more optimally, it is necessary to cooperate and pay attention on the relationship between the Central Government and the Regional Government to conduct training on an ongoing basis, especially in the village of Cibodas.

Keywords: Capacity Building, Good Governance, village government

INDEKS NASKAH TAHUN 2019 BERDASARKAN ABJAD

1. Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal : Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat; Oleh Endah Mustika Ramdani; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.
2. Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) pada Kementerian Keuangan Oleh Hasan Ashari dan Rachman Sukri; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.
3. The SIMPeL application is developed by LPSE of Ministry of Finance to facilitate the direct
4. Analisis Perencanaan E-learning Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Bandung; Oleh Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.
5. Case Studies of Public Sector Innovation in Increasing Local Tax Compliance Oleh Pratiwi; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.
6. Evaluasi Praktik Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Indonesia Oleh Asih Setiawati; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.
7. Implementasi Manajemen Pengetahuan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Garut; Oleh Tjutju Yuniarsih dan Hendarsita Amartiwi; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.
8. Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang; Oleh Ahmad Sururi; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.
9. Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia (Studi Kasus: UU Nomor 1 Tahun 1970) Oleh Masrully; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.
10. Model Implementasi Inovasi di Sektor Publik Studi pada Inovasi E-Office Satu Pintu di Puslatbang PKASN LAN; Oleh Hari Nugraha; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.
11. Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan dalam rangka Pencapaian Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen); Oleh Hadi Arnowo; Volume 22, Nomor 1 Tahun 2019.
12. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance; Oleh Neri Fajarwati; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.
13. Perencanaan Strategis Kawasan Berbasis Tata Kelola Lingkungan Terdesentralisasi yang Baik pada Kawasan Situ Gede Kota Tasikmalaya; Oleh Tomi Setiawan, Endang Suhendar, Hilman A. Muhyi, dan Dayat Hidayat; Volume 22, Nomor 2 Tahun 2019.

